



Standarisasi Kompetensi Mahasiswa Melalui Ujian Komprehensif dalam Meningkatkan Kualitas Profil Lulusan

Arief Wahyudi

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ariefwahyudi@unimed.ac.id

Jamaludin

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: jamaludin@unimed.ac.id

Oksari Anastasya Sihaloho

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: oksari.sihaloho@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2026-06-17
Revised : 2026-06-19
Accepted : 2026-06-19
Published : 2026-06-20

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10935>

Abstrak

Transformasi kurikulum di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuntut reformasi instrumen evaluasi pada pendidikan tinggi guna menjamin keterikatan (*link and match*) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implementasi standarisasi kompetensi melalui ujian komprehensif dalam meningkatkan kualitas profil lulusan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (FIS Unimed). Melalui pendekatan kualitatif-analitis berbasis studi dokumen kurikulum dan wawancara mendalam, studi ini membedah reposisi ujian komprehensif sebagai instrumen integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujian komprehensif yang dirancang melalui pengelompokan bidang keilmuan (Pendidikan, Hukum, dan Sosial-Politik) berhasil membangun fondasi teoretis yang kokoh bagi mahasiswa sebelum menempuh ujian skripsi (meja hijau). Penilaian berjenjang dengan predikat lulus (Unggul, Sangat Baik, dan Baik) melalui mekanisme remedial multipel memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menguasai wawasan keilmuan secara integralistik. Lebih jauh, evaluasi standar ini berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam memastikan lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki daya saing linier di dunia karir. Studi ini merekomendasikan pelebagaan ujian komprehensif berbasis sistem bank soal digital yang adaptif terhadap dinamika hukum dan politik kontemporer.

Kata Kunci: Standarisasi Kompetensi, Ujian Komprehensif, Profil Lulusan, PPKn FIS Unimed, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Abstract

Curriculum transformation in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) era demands reform of evaluation instruments in higher education to ensure the link and match between graduate competencies and job market needs. This study aims to analyze the urgency and implementation of competency standardization through comprehensive exams in improving the quality of graduate profiles in the Department of Pancasila and Citizenship Education (PPKn), Faculty of Social Sciences, Medan State University (FIS Unimed). Through a qualitative-analytical approach based on curriculum document studies and in-depth interviews, this study dissects the repositioning of comprehensive exams as integrative instruments. The results show that comprehensive exams designed through grouping of scientific fields (Education, Law, and Socio-Politics) successfully build a solid theoretical foundation for students before taking the thesis exam (green table). Tiered assessment with passing grades (Excellent, Very Good, and Good) through multiple remedial mechanisms provides space for students to master scientific insights in an integral manner. Furthermore, this standardized evaluation contributes directly to the achievement of higher education's Key Performance Indicators (KPI), particularly in ensuring graduates secure decent jobs and maintain linear competitiveness in the career world. This study recommends the



institutionalization of a comprehensive exam based on a digital question bank system that adapts to contemporary legal and political dynamics.

Keyword: *Competency Standardization, Comprehensive Exam, Graduate Profile, PPKn FIS Unimed, Independent Learning Independent Campus*

PENDAHULUAN

Reposisi tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia kini dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas publik yang kian ketat. Perguruan tinggi tidak hanya ditantang untuk merekrut input mahasiswa dalam jumlah besar, melainkan diwajibkan menjamin bahwa output yang dihasilkan memiliki relevansi fungsional dengan dinamika global. Dalam ranah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tantangan ini terasa lebih berlipat ganda. Karakteristik keilmuan PPKn bersifat multidimensional dan interdisipliner, yang menuntut penguasaan komprehensif tidak hanya pada aspek pedagogis, tetapi juga pemahaman substantif pada aspek hukum, sosiologi, politik, dan moralitas kebangsaan. Di tengah gelombang disrupsi teknologi dan perubahan struktural dunia kerja, instrumen penjaminan mutu internal di tingkat jurusan memegang peranan yang sangat vital dalam menavigasi kualitas lulusan agar tidak mengalami disorientasi kompetensi.

Jurusan PPKn pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS Unimed) sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terkemuka di Sumatera Utara memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk menjawab tantangan tersebut. Reorientasi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang disinergikan dengan kebijakan nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuntut adanya titik temu yang tegas antara kebebasan belajar mahasiswa di luar kampus dengan penguatan kompetensi dasar keilmuan di dalam program studi (Tri Suswanto Saptadi et al. 2024). Di satu sisi, kebijakan MBKM memberikan fleksibilitas luar biasa bagi mahasiswa untuk mengambil magang, proyek kemanusiaan, atau pertukaran pelajar. Namun di sisi lain, fleksibilitas ini menyimpan risiko terjadinya fragmentasi pengetahuan jika mahasiswa kehilangan jangkar teoretis dan konseptual dari core keilmuan asalnya.

Research gap dalam literatur manajemen pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kajian evaluasi hasil belajar masih bertumpu pada perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan penilaian skripsi sebagai indikator tunggal kualitas lulusan. Padahal, IPK sering kali bersifat bias akibat perbedaan standar penilaian antardosen, sedangkan skripsi cenderung hanya menguji satu topik spesifik yang menjadi objek penelitian mahasiswa. Akibatnya, banyak ditemukan kasus di mana seorang mahasiswa memperoleh nilai skripsi yang sangat memuaskan, namun gagal menjelaskan konsep-konsep elementer dalam tata negara, filsafat Pancasila, atau metodologi pembelajaran ketika dihadapkan pada realitas profesi. Di sinilah letak urgensi kebijakan standarisasi kompetensi melalui instrumen ujian komprehensif

di tingkat jurusan sebagai prasyarat wajib sebelum mahasiswa melangkah ke tahapan ujian meja hijau atau sidang skripsi (Kinedy and As, n.d.).

Kebijakan ujian komprehensif di Jurusan PPKn FIS Unimed didesain untuk menjadi jembatan integratif yang merajut kembali serpihan pengetahuan mahasiswa selama masa perkuliahan. Melalui pengelompokan ranah keilmuan yang terstruktur meliputi bidang kependidikan, bidang hukum, serta bidang sosial dan politik ujian ini berupaya memastikan bahwa setiap calon sarjana memiliki jangkar epistemologis yang kuat. Kebijakan ini tidak bermaksud menciptakan barikade birokratis yang mempersulit kelulusan mahasiswa, melainkan bertindak sebagai mekanisme penjaminan mutu yang memberikan kepastian bahwa lulusan PPKn Unimed memiliki kualifikasi yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja modern, baik sebagai pendidik profesional maupun analis kebijakan sosial-kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam mengenai implementasi standarisasi kompetensi melalui ujian komprehensif di Jurusan PPKn FIS Unimed. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana rekonstruksi ujian komprehensif ini mampu mengintegrasikan tiga klaster keilmuan secara integralistik, menguji keselarasan instrumen ini dengan visi kurikulum MBKM, serta memetakan dampaknya terhadap peningkatan daya saing profil lulusan dalam memperoleh pekerjaan yang layak di dunia karir. Melalui studi ini, diharapkan diperoleh sebuah model konseptual evaluasi akhir tingkat jurusan yang dapat direplikasi oleh institusi pendidikan sejenis di Indonesia (Taba, Rahmandan, and Pramudibyo 2025).

METODE

Studi ini dirancang menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus intrinsik (intrinsic case study). Lokasi penelitian dilakukan secara spesifik di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS Unimed). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik Jurusan PPKn FIS Unimed yang telah secara konsisten mengimplementasikan kebijakan ujian komprehensif berjenjang sebagai syarat mutlak kelayakan pengajuan skripsi di tengah pelaksanaan kurikulum MBKM (Yusanto 2019).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu Studi Dokumentasi Meliputi analisis terhadap Buku Pedoman Akademik FIS Unimed, silabus ujian komprehensif, rubrik penilaian, data kelulusan mahasiswa, serta data pelacakan alumni kurun waktu 2022–2025, Wawancara Mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif, terdiri dari Ketua Jurusan PPKn, 4 dosen penguji perwakilan masing-masing klaster keilmuan (Pendidikan, Hukum, Politik), serta 6 mahasiswa yang telah menempuh ujian komprehensif dengan predikat kelulusan yang bervariasi, Observasi Partisipatif Terbatas, Dilakukan terhadap jalannya proses ujian komprehensif lisan dan rapat pleno penentuan kategori kelulusan di tingkat jurusan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber membandingkan keterangan mahasiswa, dosen, dan pimpinan serta triangulasi metode menyilangkan data wawancara dengan dokumen regulasi internal jurusan (Minanda Putri and Mirela 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kebijakan Ujian Komprehensif sebagai Koridor Mutu di PPKn FIS Unimed

Berdasarkan hasil telaah dokumen regulasi internal Jurusan PPKn FIS Unimed, kebijakan ujian komprehensif diposisikan sebagai instrumen penyaring yang bersifat wajib. Kebijakan ini menetapkan bahwa mahasiswa tidak diperkenankan mendaftar atau melaksanakan ujian meja hijau (sidang skripsi) sebelum mereka dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif tingkat jurusan. Ketentuan ini menempatkan kemampuan dasar pada aspek pengetahuan (knowledge) sebagai koridor utama yang menjaga marwah akademik program studi.

Secara institusional, kebijakan ini lahir sebagai respons kritis terhadap kecenderungan penurunan penguasaan materi teoretis mahasiswa akibat model perkuliahan yang terlalu fokus pada penyelesaian tugas-tugas administratif tanpa pendalaman konseptual. Hasil wawancara dengan pimpinan jurusan menegaskan bahwa skripsi sering kali membatasi cakrawala pandang mahasiswa hanya pada lokus dan variabel penelitiannya yang sempit. Sebagai contoh, mahasiswa yang meneliti tentang “Efektivitas Model Pembelajaran Project Citizen di SMA X” cenderung hanya menguasai model tersebut, namun gagap ketika ditanya mengenai sejarah perumusan Pancasila atau dinamika hukum tata negara Indonesia. Oleh sebab itu, ujian komprehensif hadir untuk merevitalisasi wawasan keilmuan mahasiswa secara integralistik, menguji ingatan jangka panjang, serta kemampuan mengaitkan berbagai teori yang telah dipelajari sejak semester pertama.

Pengelompokan Bidang Keilmuan sebagai Pondasi Teoretis yang Kokoh

Keunggulan utama dari model ujian komprehensif yang diterapkan di Jurusan PPKn FIS Unimed terletak pada kategorisasi materi pengujian yang secara rigid dibagi ke dalam tiga klaster keilmuan utama. Pola pengujian ini tidak dilakukan secara umum, melainkan didelegasikan kepada tim dosen penguji yang memiliki kepakaran linier pada masing-masing bidang tersebut.

1. Klaster Bidang Pendidikan

Pada dimensi ini, mahasiswa diuji terkait kapasitas mereka sebagai calon pendidik profesional. Materi ujian tidak sekadar menyentuh ingatan tentang definisi komponen-

komponen kurikulum, melainkan menuntut kemampuan analisis kritis terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Mahasiswa ditantang untuk mendesain instrumen penilaian autentik yang mampu mengukur ketercapaian Profil Pelajar Pancasila secara objektif. Kemampuan teoretis mengenai pengelolaan kelas, penyelesaian miskonsepsi dalam materi civic education, serta penerapan teknologi pembelajaran abad ke-21 menjadi parameter utama kelayakan mahasiswa dalam klaster ini.

2. Klaster Bidang Hukum

Klaster hukum memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa lulusan PPKn Unimed tidak hanya bertindak sebagai “guru moral”, tetapi juga sebagai ilmuwan sosial yang paham hukum negara. Fokus pengujian ditekankan pada dinamika konstitusionalisme Indonesia, anatomi sistem hukum nasional, serta perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sesi ujian, mahasiswa diwajibkan mampu membedah kasus-kasus sengketa kewenangan lembaga negara, implikasi yuridis dari amandemen UUD NRI Tahun 1945, hingga dinamika hukum internasional yang memengaruhi kedaulatan negara. Penguasaan hukum yang rigid ini menjadi pembeda utama antara sarjana PPKn dengan sarjana pendidikan lainnya.

3. Klaster Bidang Sosial dan Politik

Sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Sosial, mahasiswa PPKn wajib memiliki ketajaman analisis terhadap struktur sosial dan kontestasi politik di Indonesia. Materi pada klaster ini mencakup teori sosiologi makro, sosiologi pedesaan dan perkotaan, sistem politik Indonesia, budaya politik masyarakat, hingga kebijakan publik. Mahasiswa diuji kemampuannya dalam menganalisis fenomena seperti polarisasi politik di media sosial, efektivitas kebijakan desentralisasi, serta peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi. Analisis ini menuntut mahasiswa untuk menggunakan kacamata objektivitas ilmiah, menjauhkan mereka dari opini dangkal atau tendensius yang tidak berbasis data.

Integrasi ketiga klaster keilmuan ini dalam satu momentum ujian komprehensif memaksa mahasiswa untuk melihat PPKn sebagai satu kesatuan organik. Klaster hukum menyediakan substansi materi (content), klaster sosial-politik menyediakan konteks realitas empiris (context), dan klaster kependidikan menyediakan metodologi transmisi nilai (transmission). Ketika ketiga aspek ini berpadu dalam struktur kognitif mahasiswa, maka kualifikasi kelulusan mereka akan berada pada level yang sangat meyakinkan.

Sinergitas Ujian Komprehensif dengan Epistemologi Kurikulum MBKM

Pelaksanaan kebijakan MBKM sering kali memunculkan kekhawatiran di kalangan akademisi mengenai “pengenceran” bobot keilmuan program studi akibat mahasiswa menghabiskan waktu hingga tiga semester di luar kampus. Namun, hasil riset ini menunjukkan

bahwa Jurusan PPKn FIS Unimed berhasil membalikkan tantangan tersebut menjadi sebuah peluang strategis dengan memanfaatkan ujian komprehensif sebagai jangkar akuntabilitas.

Ujian komprehensif didesain untuk bersinergi dan melengkapi pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM seperti Kampus Mengajar, Magang Bersertifikat, atau Proyek Desa. Mahasiswa yang baru kembali dari program MBKM diuji kemampuannya untuk mengonseptualisasikan pengalaman empiris mereka di lapangan ke dalam teori-teori makro yang diujikan dalam komprehensif. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengikuti magang di kantor pemerintah daerah dituntut mampu menjelaskan struktur hukum administrasi negara dan proses formulasi kebijakan publik yang mereka saksikan secara langsung di lapangan dengan teori-teori hukum dan politik formal.

Dengan demikian, ujian komprehensif bertindak sebagai laboratorium reflektif yang merekatkan aspek ontologis dengan aspek epistemologis. Sinergitas ini memastikan bahwa profil lulusan yang dihasilkan tidak hanya kaya akan keterampilan praktis dunia kerja, tetapi tetap memiliki kedalaman intelektual dan tidak kehilangan identitas ilmiahnya sebagai Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Mekanisme Kelulusan Berjenjang dan Fungsi Remedial Berkelanjutan

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah penerapan sistem penilaian berjenjang yang memberikan klasifikasi predikat kelulusan secara eksplisit kepada mahasiswa, yaitu:

- Unggul: Nilai rentang 85 - 100
- Sangat Baik: Nilai rentang 75 - 84
- Baik: Nilai rentang 65 - 74

Pemberian kategori ini memberikan dampak psikologis yang positif berupa tumbuhnya iklim kompetisi akademis yang sehat di kalangan mahasiswa. Kategori lulus tidak lagi sekadar dikotomi biner antara “Lulus” atau “Gagal”, melainkan sebuah refleksi dari tingkat penguasaan materi yang dicapai. Mahasiswa yang membidik predikat “Unggul” terpacu untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ujian dilaksanakan, yang secara otomatis meningkatkan frekuensi membaca buku teks dan diskusi ilmiah di lingkungan kampus.

Bagi mahasiswa yang belum mencapai batas ambang nilai kelulusan minimum (nilai < 65), jurusan tidak serta-merta mengeliminasi hak akademis mereka. Sistem ujian komprehensif di PPKn FIS Unimed menerapkan mekanisme pemberian beberapa kali kesempatan melalui ujian remedial yang terprogram. Kebijakan ini selaras dengan prinsip mastery learning (belajar tuntas), di mana fokus evaluasi adalah memastikan penguasaan materi secara utuh, bukan sekadar menghukum kegagalan mahasiswa (Andriani, Maemonah, and Satria Wiranata 2022).

Proses remedial didahului dengan sesi bimbingan khusus oleh dosen pembina klaster untuk mengidentifikasi titik lemah kognitif mahasiswa. Pendekatan humanis dan edukatif ini memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan perlakuan yang adil untuk memperbaiki kapasitas intelektualnya hingga mencapai standar kelulusan yang ditetapkan.

Implikasi Terhadap Kualitas Profil Lulusan dan Relevansi Dunia Kerja (Link and Match)

Dampak jangka panjang dari standarisasi kompetensi melalui ujian komprehensif bermuara pada peningkatan kualitas profil lulusan yang terukur dari indikator keterserapan di dunia karir. Kebijakan ini memiliki korelasi linier yang positif terhadap perolehan pekerjaan yang layak bagi para alumni.

Dalam dunia kerja modern, khususnya pada sektor profesi keguruan dan analisis kebijakan, proses rekrutmen tidak lagi hanya melihat transkrip nilai yang tinggi secara administratif, melainkan melakukan tes substansi keilmuan yang sangat ketat (misalnya melalui Seleksi Kompetensi Bidang pada CPNS atau tes kompetensi profesional pada lembaga swasta). Lulusan Jurusan PPKn FIS Unimed yang telah melewati tempaan ujian komprehensif memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dalam fase ini. Karena mereka telah terbiasa diuji secara lisan dan tertulis secara integratif pada tiga klaster ilmu (Pendidikan, Hukum, Politik), mentalitas akademis dan retorika konseptual mereka telah matang.

Berdasarkan data pelacakan alumni (*tracer study*) Jurusan PPKn FIS Unimed tahun 2024–2025, terjadi penurunan masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan linier secara signifikan, dari yang semula rata-rata 6,5 bulan menjadi 3,2 bulan setelah kelulusan. Lulusan tidak hanya terserap sebagai guru PPKn di sekolah menengah, tetapi banyak yang berhasil menembus posisi strategis sebagai staf analis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), fasilitator pemberdayaan masyarakat, LSM hak asasi manusia, serta jurnalis politik. Keberhasilan ini menjadi bukti empiris bahwa standarisasi kompetensi dasar di lingkup jurusan bertindak sebagai katalisator utama terwujudnya kondisi link and match yang sesungguhnya antara dunia akademik dengan realitas industri kerja.

SIMPULAN

Kebijakan standarisasi kompetensi melalui ujian komprehensif di Jurusan PPKn FIS Unimed terbukti bukan sekadar instrumen administratif-formalitas, melainkan sebuah pilar strategis dalam penjaminan mutu internal yang esensial. Ujian ini berhasil mereposisi diri sebagai koridor mutu yang wajib dilalui mahasiswa sebelum melangkah ke ujian meja hijau (skripsi), memastikan aspek pengetahuan dasar mahasiswa berada pada level terbaiknya. Melalui pengelompokan bidang keilmuan yang komprehensif mencakup pilar kependidikan,

hukum, serta sosial dan politik ujian ini mampu membangun fondasi teoretis yang integralistik, mencegah fragmentasi pengetahuan yang rentan terjadi dalam fleksibilitas kurikulum MBKM.

Sistem penilaian berjenjang (Unggul, Sangat Baik, Baik) dikombinasikan dengan mekanisme remedial berkelanjutan terbukti efektif memicu motivasi berprestasi mahasiswa tanpa mengabaikan prinsip keadilan edukatif. Implikasi nyata dari ketatnya standarisasi evaluasi ini tercermin dari meningkatnya kualitas profil lulusan, yang secara empiris dibuktikan dengan semakin pendeknya masa tunggu alumni dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta tingginya tingkat adaptabilitas mereka di dunia karir. Dengan demikian, ujian komprehensif merupakan instrumen wajib yang mutlak dipertahankan dan terus dikembangkan demi menjaga akuntabilitas akademik perguruan tinggi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Kiki Melita, Maemonah, and Rz. Ricky Satria Wiranata. (2022). Penerapan Teori Belajar Behavioristik B. F. Skinner Dalam Pembelajaran : Studi Analisis Terhadap Artikel Jurnal Terindeks Sinta Tahun 2014 – 2020. *SALIHA* 5 (1): 78–91.
- Kinedy, Ary Kiswanto, and Agus Putra As. n.d. Pedoman Audit Mutu Internal.
- Minanda Putri, Amiga, and Tiarani Mirela. (2026). Keunggulan Kompetitif Madrasah Aliyah Negeri Keterampilan Di Era Digital: Studi Kualitatif Di MAN 1 Kota Kediri. *Kajian Pendidikan Agama Islam* 8 (April): 50–65.
- Taba, Farel Arsyadbaisyah, Hafid Rahmandan, and Sugeng Pramudibyo. (2025). Systematic Literatur Review (Slr): Peran Kurikulum Pendidikan Tinggi Dalam Membangun Kompetensi Global Mahasiswa Di Era, 4 (2): 18–25.
- Tri Suswanto Saptadi, Norbertus, Alwi Muhammad, Giandari Maulani, Winda Novianti, Mas'ud Muhammadiyah, Yenni Agustina, Erni Susilawati, et al. (2024). *Revolusi Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.
- Yusanto, Yoki. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif, 1 (1): 1–13.